

KONFLIK PADA KAWASAN TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN UPAYA PENYELESAIANNYA

*(Conflict Resolution at of Bantimurung Bulusaraung National Park
of South Sulawesi Province)*

Abd. Kadir W.¹, Nurhaedah M.² & Rini Purwanti³
^{1,2,3}Balai Penelitian Kehutanan Makassar, Sulawesi Selatan
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 165, Makassar
e-mail: abdkadirw@yahoo.com

Diterima 19 Februari 2013, direvisi 24 Juni 2013, disetujui 19 Agustus 2013

ABSTRACT

Establishment of Bantimurung Bulusaraung National Park (Babul National Park) in Maros District caused some impacts to community within and around the forest. This establishment was potentially lead conflict between government and community. This study was aimed to observe conflicts that occurred in the area and to identify what formula was needed to resolve the conflict. The results showed that the conflict between government and local communities in Babul National Park related to the boundary and forest resources utilization of National Park. Those were due to different perception and received information by communities. In addition, lack of socialization of National Park policies and socio-economic condition of communities (i.e. low income) created those conflicts. Some efforts to address and prevent wider conflict was by providing wider communication and dialogue with the people, policy dissemination of National Park and developed detailed National Park activities based on National Park zones. Those were under specific circumstances, i.e.: condition and aspiration of the people.

Keywords: Bantimurung Bulusaraung National Park, boundary conflict, forest resources utilization conflict, resolving conflict

ABSTRAK

Perubahan fungsi sebagian kawasan hutan di Kabupaten Maros menjadi kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN Babul) membawa dampak tersendiri bagi aktivitas masyarakat sekitar kawasan yang dapat memicu terjadinya konflik antara pemerintah dengan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui konflik yang terjadi dalam pengelolaan TN Babul serta upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat sekitar dalam pengelolaan TN Babul terkait dengan tata batas kawasan dan pemanfaatan sumberdaya alam hutan (SDAH) yang terdapat di dalamnya. Konflik tersebut disebabkan oleh perbedaan persepsi dan pemberian informasi yang kurang benar dan lengkap terkait tata batas kawasan hutan dan pemanfaatan SDAH, belum efektifnya kegiatan sosialisasi kebijakan taman nasional, serta rendahnya tingkat pendapatan masyarakat sekitar kawasan TN Babul. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi dan mencegah terjadinya konflik yang lebih luas adalah dengan melakukan komunikasi dan dialog dengan masyarakat, melakukan sosialisasi kebijakan Taman Nasional dan mendetailkan kegiatan-kegiatan pada setiap zona TN Babul dengan tetap memperhatikan kondisi dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

Kata kunci: TN Babul, konflik batas, konflik pemanfaatan SDAH, penyelesaian konflik

I. PENDAHULUAN

Keberhasilan pengelolaan Taman Nasional berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi yaitu menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan, menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistem, serta mengendalikan cara-cara pemanfaatan

sumberdaya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Kawasan-kawasan konservasi termasuk Taman Nasional di seluruh Indonesia mempunyai permasalahan yang mengancam kelestariannya. Permasalahan tersebut diantaranya adalah tumpang tindih kepentingan dari berbagai pihak, belum adanya kesamaan persepsi mengenai fungsi, kedudukan dan peran Taman Nasional di mata masyarakat dan pihak terkait lainnya

(Mangindaan, 1999; Munggoro, 1999; Siregar, 1999). Perbedaan kepentingan sebagaimana dijelaskan di atas mengakibatkan terjadinya konflik yang pada akhirnya akan mempengaruhi pengelolaan Taman Nasional secara keseluruhan.

Pruitt dan Rubin (2009) mendefinisikan konflik sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*percieved divergence of interest*). Sementara Robbins (1993) dalam Tadjudin (2000), mendefinisikan konflik sebagai suatu proses yang dimulai ketika suatu pihak merasa ada pihak lain yang memberikan pengaruh negatif kepadanya atau ketika suatu pihak merasa kepentingannya telah memberikan pengaruh negatif kepada pihak lainnya.

Konflik dalam pengelolaan TN Babul di Sulawesi Selatan sangat mungkin terjadi. Hal ini disebabkan karena banyaknya kepentingan baik kepentingan masyarakat, kepentingan negara dan kepentingan pemerintah dalam hal pemanfaatan SDAH. Masing-masing pihak merasa memiliki alasan yang kuat untuk mempertahankan kepentingannya di kawasan tersebut. Konflik yang terjadi jika tidak

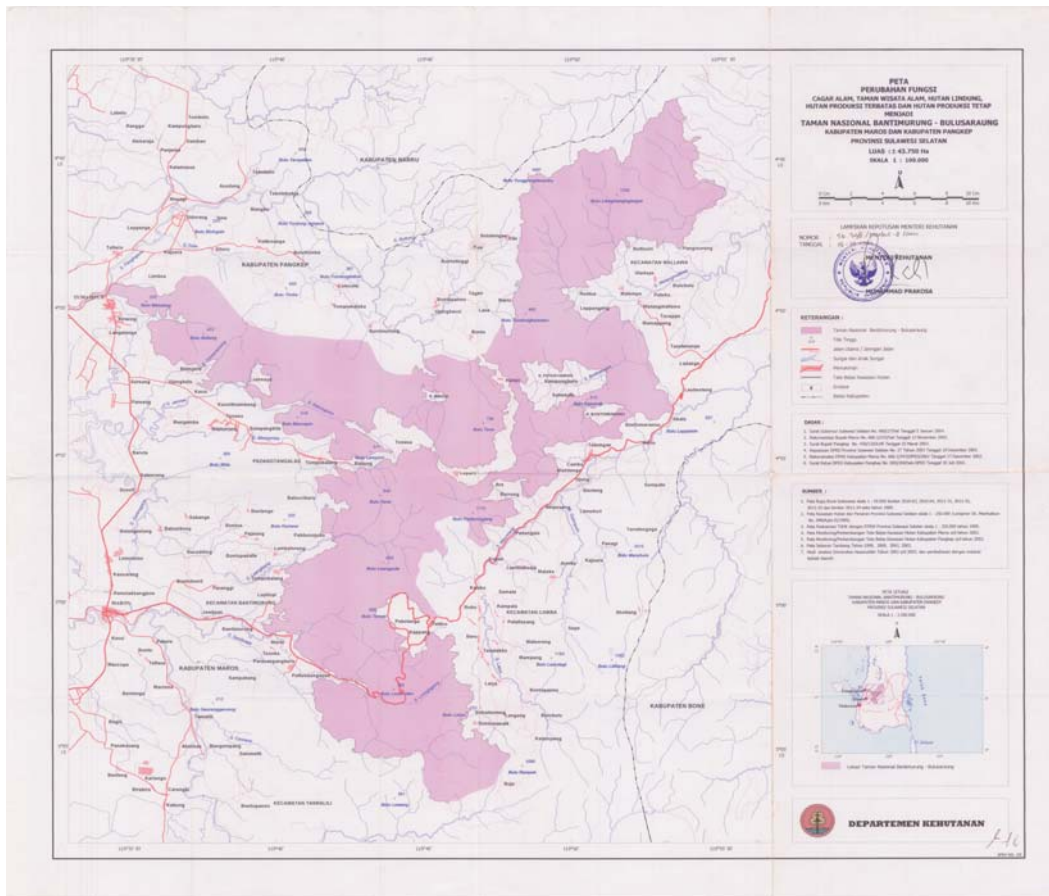
dikelola dengan baik, dapat berujung pada terjadinya tindak kekerasan yang akan merugikan pihak-pihak yang berkonflik. Untuk itu, diperlukan penelitian mengenai analisis konflik dalam pengelolaan TN Babul, sehingga konflik-konflik yang terjadi dapat dipetakan dengan jelas dan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan data dan penjelasan mengenai jenis-jenis konflik, penyebab konflik dan upaya penyelesaian konflik dalam pengelolaan TN Babul.

II. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan November tahun 2011 pada kawasan TN Babul khususnya di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan (Gambar 1).



Gambar 1. Lokasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Provinsi Sulawesi Selatan
Figure 1. Location Bantimurung Bulusaraung National Park, South Sulawesi

B. Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah merupakan penelitian deskriptif dengan metoda studi kasus. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan melalui teknik *purposive sampling* dengan kriteria kecamatan/desa yang berbatasan dengan kawasan TN Babul dimana terjadi konflik kepentingan antara masyarakat dan pengelola kawasan TN Babul. Pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian kegiatan, sebagai berikut:

1. Survei lapangan

Kegiatan survei lapangan dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai konflik kepentingan dalam pengelolaan TN Babul khususnya kepentingan antara masyarakat dan pemerintah.

2. Wawancara

Kegiatan wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran lebih rinci mengenai penyebab konflik dalam pengelolaan TN Babul, ditinjau dari berbagai sudut pandang sebagaimana dikemukakan oleh Fisher *et al.* (2001) yang meliputi; (a) hubungan masyarakat (adanya polarisasi, ketidakpercayaan, dan permusuhan di antara kelompok dalam suatu masyarakat), (b) negosiasi prinsip (posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan oleh pihak-pihak yang berkonflik), (c) kebutuhan manusia (kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi atau terhalangi), (d) identitas (karena identitas yang terancam yang sering berakar pada penderitaan di masa lalu yang tidak terselesaikan), dan (e) transformasi konflik (ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, ekonomi, dan budaya).

Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. Dalam teknik *snowball sampling*, jumlah responden bukan hal utama melainkan kedalaman informasi yang diberikan oleh setiap responden.

Kegiatan wawancara dilakukan terhadap masyarakat petani sekitar TN Babul (180 orang) dan sejumlah informan kunci yang memiliki pengetahuan dan atau kepakaran yang terkait dengan penelitian ini seperti staf Balai TN Babul (3 orang), Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros (2 orang), Staf Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros (1 orang), Staf Dosen Universitas Hasanuddin (3 orang), Aparat Desa dan Kecamatan (5 orang), tokoh-tokoh

masyarakat (5 orang), Anggota Forum Masyarakat TN Babul (1 orang), dan Anggota LSM Payo-payo (1 orang).

3. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data-data pendukung terkait konflik yang terjadi dalam pengelolaan TN Babul. Untuk keperluan tersebut, maka data yang dikumpulkan bersumber dari dokumen atau laporan kegiatan instansi terkait serta hasil-hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

C. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis penjelasan untuk data-data yang bersifat kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar TN Babul

Masyarakat sekitar TN Babul pada umumnya (92,2%) berprofesi sebagai petani dengan tingkat pendidikan yang rendah (84,4% berpendidikan \leq SD) dan jumlah tanggungan keluarga yang cukup besar (72,8% memiliki jumlah tanggungan keluarga > 2 orang). Selain itu, sebagian masyarakat sekitar TN Babul (65,0%) hidup di bawah garis kemiskinan dan memiliki tingkat ketergantungan ekonomi terhadap kawasan TN Babul yang cukup tinggi (Kadir W. *et al.*, 2012a).

Masyarakat yang sebagian berprofesi sebagai petani sangat bergantung kepada sumberdaya lahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat sekitar TN Babul pada umumnya (76,7%) memiliki lahan dalam kawasan TN Babul. Lahan garapan masyarakat dalam kawasan TN Babul belum memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (56,1% masyarakat memiliki luas lahan ≤ 1 ha). Lahan harapan tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengembangkan beberapa komoditi di dalamnya diantaranya komoditi kehutanan seperti kemiri (*Alleurites moluccana*), gmelina (*Gmelina areborea*), jati (*Tectona grandis*), dan mahoni (*Swetenia macrophylla*); komoditi perkebunan seperti kopi (*Coffea* sp), kakao (*Theobroma cacao*), cengkeh (*Syzygium aromaticum*),

serta komoditi pertanian seperti padi (*Oryza sativa*), jagung (*Casaea zeamae*), kacang tanah (*Arachis hypogea*), cabe (*Capsicum annuum* L.), dan tomat (*Solanum lycopersicum*) (Kadir W. *et al.*, 2012a).

Salah satu komoditi yang banyak dikembangkan masyarakat dalam kawasan TN Babul dan memiliki peranan yang sangat penting terhadap perekonomian masyarakat adalah tanaman kemiri. Tanaman kemiri tersebut telah dikembangkan secara turun temurun sejak jaman pemerintahan Belanda (Yusran, 2005; Jusuf *et al.*, 2010). Tanaman kemiri tersebut saat ini telah mengalami penurunan produksi karena umur tanaman yang sudah tua (sekitar 56 tahun) sehingga memunculkan keinginan masyarakat untuk meremajakannya. Keinginan masyarakat untuk meremajakan tanaman kemiri dalam kawasan TN Babul terkendala oleh adanya ketidakkonsistenan dalam kebijakan pemerintah terkait pengelolaan kawasan konservasi (taman nasional) (Kadir W. *et al.*, 2012b).

Perubahan fungsi beberapa kawasan hutan di Kabupaten Maros menjadi TN Babul tentunya berdampak terhadap aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat sekitar kawasan TN Babul merasakan bahwa perubahan kawasan hutan tersebut menyebabkan mereka mengalami keterbatasan dalam memanfaatkan sumberdaya SDAH telah berlangsung secara turun temurun.

B. Jenis Konflik dalam Pengelolaan TN Babul

Konflik dapat diterjemahkan sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan atau suatu proses di mana suatu pihak merasa ada pihak lain yang memberikan pengaruh negatif kepadanya atau ketika suatu pihak merasa kepentingannya telah memberikan pengaruh negatif kepada pihak lainnya. Setiap perbedaan merupakan potensi konflik yang jika tidak ditangani dengan baik akan berubah menjadi konflik terbuka (Robbins, 1993 dalam Tadjudin, 2000).

TN Babul secara administratif terletak dalam tiga wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, dan Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah TN Babul terbagi habis ke dalam 10 wilayah kecamatan, 40 desa dan 71 dusun/lingkungan (Balai TN Babul, 2008). Kondisi ini menyebabkan TN Babul sangat rentan terjadinya konflik kepentingan antara masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan sejumlah petani sekitar kawasan TN Babul dan sejumlah informan kunci diketahui bahwa konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah selaku pengelola kawasan TN Babul terdiri dari: a) konflik yang terkait dengan tata batas kawasan TN Babul, dan b) konflik yang terkait dengan pemanfaatan SDAH yang terdapat dalam kawasan TN Babul.

1. Konflik tata batas kawasan TN Babul

Konflik tata batas kawasan TN Babul berawal dari adanya perbedaan persepsi antara masyarakat dengan pihak kehutanan (Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Dinas Kehutanan) pada saat pengukuran dan pemancangan batas kawasan hutan yang terjadi antara tahun 1980-an sampai dengan tahun 1990-an, dan antara masyarakat dengan pihak TN Babul pada saat dilakukan rekonstruksi tata batas tahun 2007.

Konflik antara masyarakat dengan pihak kehutanan (Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Dinas Kehutanan Maros) terjadi saat pengukuran untuk penetapan status kawasan hutan lindung, hutan produksi, hutan wisata, dan cagar alam di Kabupaten Maros. Masyarakat berpedoman pada batas yang ditetapkan pada masa kolonial Belanda yang lokasinya berada jauh di atas bukit, sementara pihak kehutanan memasukkan suatu wilayah menjadi kawasan hutan didasarkan pada kriteria yang telah disusun oleh Departemen Kehutanan, sehingga sebagian wilayah yang selama ini digarap oleh masyarakat berubah status menjadi kawasan hutan.

Masyarakat sekitar kawasan TN Babul pada umumnya memiliki pengetahuan sendiri mengenai batas kawasan hutan yang ada di daerahnya sebelum berubah fungsi menjadi kawasan TN Babul. Informasi mengenai batas kawasan hutan tersebut pada umumnya mereka peroleh dari masyarakat sekitar, dari orang tua mereka, dan dari aparat kehutanan.

2. Konflik dalam pemanfaatan sumber daya alam hutan

Konflik tata batas antara masyarakat dengan TN Babul pada akhirnya berimplikasi menjadi konflik dalam pemanfaatan sumberdaya alam hutan baik berupa pemanfaatan lahan maupun pemanfaatan tanaman yang telah dikembangkan oleh masyarakat yang sekarang berada di dalam

kawasan TN Babul. Konflik dalam pemanfaatan lahan terjadi karena adanya perbedaan pemahaman antara masyarakat dengan pemerintah tentang peruntukan lahan dalam kawasan hutan. Bagi masyarakat sekitar hutan, lahan yang ada baik lahan yang terdapat dalam kawasan hutan maupun yang terdapat di luar kawasan hutan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan membuka kebun atau sawah. Bagi pemerintah lahan yang ada khususnya yang terdapat dalam kawasan hutan diperuntukkan sesuai dengan fungsinya (fungsi produksi, lindung, dan konservasi) dan terkadang bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat. Demikian pula, dalam hal pemanfaatan tanaman yang terdapat dalam kawasan hutan, bagi masyarakat semua yang dihasilkan oleh tanaman (kayu dan non kayu) dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa memandang fungsi hutan tersebut (fungsi produksi, lindung, dan konservasi). Akan tetapi bagi pemerintah, pemanfaatan tanaman yang ada dalam kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi hutan tersebut.

Konflik dalam pemanfaatan SDAH yang terdapat dalam kawasan TN Babul dapat pula terjadi karena adanya pengalaman di masa lalu yang dirasakan berbeda dengan saat ini. Kondisi ini juga dialami oleh masyarakat sekitar TN Babul dalam pemanfaatan sumberdaya alam, khususnya pemanfaatan hasil hutan kayu dalam kawasan hutan.

Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu untuk memenuhi kebutuhan papan telah dilakukan oleh sebagian masyarakat dalam kawasan hutan sebelum kawasan tersebut berubah fungsi menjadi kawasan TN Babul. Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dalam kawasan hutan dengan mudah dilakukan oleh sebagian masyarakat, baik dengan jalan meminta ijin maupun tanpa ijin dari pihak terkait. Pihak yang dimintai ijin untuk maksud tersebut di atas diantaranya adalah aparat desa/dusun dan aparat kehutanan.

C. Penyebab Konflik dalam Pengelolaan TN Babul

Berdasarkan uraian pada bagian terdahulu maka dimensi penyebab konflik antara masyarakat dengan pemerintah dalam pengelolaan TN Babul adalah sebagai berikut:

1. *Hubungan masyarakat*; konflik disebabkan karena adanya polarisasi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan TN Babul, konflik dalam kaitannya dengan dimensi hubungan masyarakat lebih disebabkan oleh munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat kehutanan yang pada akhirnya memunculkan bibit permusuhan kepada aparat kehutanan. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat kehutanan berawal dari pemberian informasi yang kurang benar dan lengkap saat dilakukan penataan batas kawasan hutan sebelum berubah fungsi menjadi TN Babul. Informasi yang diberikan kepada masyarakat bahwa kegiatan penataan batas kawasan hutan hanya sekedar meletakkan patok-patok dan tidak akan berdampak pada aktivitas dan kehidupan masyarakat sekitar pada akhirnya menjadi “bumerang” bagi Balai TN Babul selaku pengelola kawasan TN Babul. Kegiatan rekonstruksi tata batas kawasan TN Babul yang dilaksanakan oleh Balai TN Babul dipandang oleh masyarakat sebagai kegiatan pengambil-alihan lahan dan menghilangkan hak mereka dalam pemanfaatan SDAH yang selama ini mereka lakukan. Kondisi seperti ini ditemui pada Kelurahan Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung dan pada Desa Samangki, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros.

2. *Negosiasi prinsip*; konflik disebabkan karena posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan oleh pihak-pihak yang berkonflik.

Posisi antara masyarakat sekitar kawasan TN Babul dan pengelola kawasan (aparat TN Babul) dapat dikatakan berada dalam posisi yang tidak setara. *Pertama*, aparat TN Babul mendapatkan mandat dari negara untuk mengelola kawasan TN Babul melalui terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 398/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang penunjukan kawasan TN Babul seluas 43.750 ha dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.29/Menhut-II/2006 tentang Pembentukan Balai TN Babul serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.03/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional yang menjadi dasar pengelolaan TN Babul. Sebaliknya

masyarakat sekitar hanya bertindak sebagai pemanfaat lahan dan SDAH secara terbatas sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, aparat TN Babul dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang cukup baik terkait kebijakan pengelolaan hutan. Sebaliknya masyarakat sekitar memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai kebijakan pengelolaan hutan yang sangat terbatas, dan terkadang hanya didasarkan pada kebiasaan yang sudah berlangsung secara turun-temurun.

Perbedaan pandangan dalam pemanfaatan SDAH terjadi karena masyarakat sekitar melakukan perbandingan terhadap pemanfaatan sumberdaya alam di masa lalu dengan saat ini, atau melakukan perbandingan terhadap adanya sejumlah masyarakat yang melakukan kegiatan pemanfaatan dalam kawasan Taman Nasional. Fenomena tersebut di atas oleh Pruitt dan Rubin (2009) disebut sebagai *invidious comparison* (perbandingan yang menyakitkan hati). Kondisi ini menstimulasi terjadinya konflik untuk alasan yang dianggap realistik maupun idealistik. Kondisi seperti ini ditemui hampir pada seluruh desa yang berbatasan dengan TN Babul.

3. *Kebutuhan manusia*; konflik disebabkan karena kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi atau terhalangi.

Konflik antara masyarakat dengan pemerintah selaku pengelola kawasan TN Babul lebih banyak disebabkan oleh karena masyarakat merasa keberadaan kawasan TN Babul dengan segala aturan yang terdapat di dalamnya akan menghalangi mereka untuk memenuhi kebutuhannya, seperti pemenuhan kebutuhan akan papan (kayu) dan kebutuhan untuk mendapatkan penghidupan yang layak melalui peningkatan pendapatan, baik yang bersumber dalam kawasan hutan maupun pada lahan milik. Kondisi seperti ini ditemui hampir pada seluruh desa yang berbatasan dengan TN Babul.

4. *Identitas*; konflik disebabkan karena identitas yang terancam yang sering berakar pada penderitaan dimasa lalu yang tidak terselesaikan.

Pemerintah pada umumnya memandang masyarakat yang tinggal di sekitar hutan sebagai perambah atau berpotensi sebagai perambah, peladang berpindah, pencuri kayu, dan sebagai pelaku penggembala liar yang dapat menjadi masalah dalam pengelolaan hutan. Artinya

masyarakat tersebut merupakan eksternalitas dan tindakan yang diambil pemerintah umumnya bersifat teknikal (menyingkirkan) (Tajuddin, 2000).

Namun, banyak fakta di lapangan bahwa perilaku masyarakat sekitar dalam pemanfaatan SDAH ada yang positif dan ada pula yang negatif. Sebagai contoh keberadaan tegakan kemiri yang banyak dijumpai di Kecamatan Camba, Mallawa dan Kecamatan Cenrana yang telah dikembangkan secara turun-temurun dan masih terjaga sampai saat ini, merupakan bukti kearifan lokal masyarakat sekitar hutan dalam mengelola dan memanfaatkan SDAH. Di samping itu juga terdapat sejumlah orang yang memiliki inisiatif untuk menanam tanaman kehutanan dalam kawasan TN Babul secara swadaya yang merupakan bukti bahwa masyarakat mampu membangun dan memelihara hutan yang patut dihargai seperti yang terdapat di Desa Labuaja, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros.

5. *Transformasi konflik*; konflik disebabkan karena ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, ekonomi, dan budaya.

Konflik antara masyarakat dan pengelola TN Babul terjadi karena adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar TN Babul. Masyarakat yang telah hidup secara turun-temurun jauh sebelum daerah tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan dan berubah fungsi menjadi TN Babul menjadi terpinggirkan dari daerahnya karena keterbatasan lahan garapan dan sumber penghasilan. Sebagian anggota keluarganya pada akhirnya melakukan migrasi ke daerah lainnya (perkotaan, lintas kabupaten, provinsi) mencari sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kondisi seperti ini banyak terjadi di Kecamatan Camba dan Mallawa, Kabupaten Maros.

Perbedaan-perbedaan antara masyarakat dan pengelola TN Babul dalam pemanfaatan SDAH, komunikasi yang buruk, kurangnya keterbukaan dan kepercayaan antara masyarakat dan pengelola TN Babul, serta keterbatasan pengelola kawasan TN Babul untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat sekitar kawasan TN Babul, menjadi penyebab terjadinya konflik. Perbedaan yang ada patut dihormati dan didialogkan. Dengan kata lain, konflik yang terjadi perlu dicarikan solusinya yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

D. Upaya Penyelesaian Konflik dalam Pengelolaan TN Babul

Konflik dapat ditemukan di hampir setiap bidang interaksi manusia. Akan tetapi, tidak setiap interaksi perlu melibatkan konflik. Hal ini terjadi karena pada umumnya manusia mampu bergaul dengan baik dengan orang-orang, kelompok, dan organisasi lain; pergaulan itu mereka lakukan dengan penuh perhatian, kemauan untuk membantu, dan keterampilan sedemikian rupa sehingga hanya terjadi sedikit konflik di dalamnya. Bilamana konflik itu memang terjadi, maka konflik itu lebih sering dapat diatasi daripada tidak (Pruitt dan Rubin, 2009).

Konflik yang muncul dalam pengelolaan SDAH bukan untuk dihilangkan akan tetapi perlu dicari solusi. Demikian halnya dengan pihak yang memiliki posisi yang lemah dalam situasi konflik tidak perlu dipinggirkan akan tetapi diberikan ruang untuk berdialog. Menurut Pruitt dan Rubin (2009), konflik yang terjadi pada dasarnya memiliki sisi

positif di samping sisi negatif. Sisi positif dari konflik adalah persemaian yang subur bagi terjadinya perubahan sosial, dapat memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi atas berbagai kepentingan, dan dapat mempererat persatuan kelompok. Sisi negatif dari konflik adalah dapat membuka jalan terjadinya tindakan yang lebih keras, jumlah masalah yang timbul dalam konflik dapat meningkat, fokus yang pada awalnya bersifat khusus dapat melebar dan menjadi bersifat global, motivasi dapat berubah untuk membuat pihak lain menderita, dan jumlah pihak yang berkonflik cenderung meningkat.

Pruitt dan Rubin (2009) mengembangkan teori dasar strategi penyelesaian konflik yang disebut dengan *dual concern model* (model kepedulian rangkap-dua). Model ini melacak pemilihan strategi berdasarkan kekuatan kepedulian relatif atas hasil yang diterima oleh diri sendiri dan hasil yang diterima oleh pihak lain sebagaimana disajikan pada Gambar 2.

Kepedulian terhadap hasil yang diterima orang lain	<i>Yielding</i> (Mengalah)	<i>Problem Solving</i> (Pemecahan masalah)
	<i>Inaction dan withdrawing</i> (“diam” dan menarik diri)	<i>Contending</i> (Bertanding)
	Kepedulian terhadap hasil yang diterima diri sendiri	

Gambar 2. *Dual Concern Model* sebagai dasar strategi untuk penyelesaian konflik
 Figure 2. *Dual Concern Model as basic strategy for conflict resolution*

Sifat dari masing-masing strategi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. *Contending* (bertanding); segala macam usaha untuk menyelesaikan konflik menurut kemauan seseorang tanpa memperdulikan kepentingan pihak lain. Pihak-pihak yang menerapkan strategi ini tetap mempertahankan aspirasinya

sendiri dan mencoba membujuk pihak lain untuk mengalah, termasuk mengeluarkan ancaman kepada pihak lain.

2. *Problem solving* (pemecahan masalah); meliputi usaha mengidentifikasi masalah dan mengembangkan serta mengarah pada solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Pihak-

pihak yang menerapkan strategi ini berusaha mempertahankan aspirasinya sendiri tetapi sekaligus berusaha mendapatkan cara untuk melakukan rekonsiliasi dengan aspirasi pihak lain. Hasilnya dapat berupa kompromi atau solusi integratif. *Problem solving* mencerminkan adanya keinginan untuk berkolaborasi.

3. *Yielding* (mengalah); pihak yang menerapkan strategi ini menurunkan aspirasinya sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. *Yielding* memang menciptakan solusi, tetapi bukan solusi yang berkualitas tinggi.
4. *Inaction* (“diam”); Tidak melakukan apa-apa. Strategi ini biasanya ditempuh untuk mencermati perkembangan lebih lanjut. *Inaction* merupakan tindakan temporer yang tetap membuka kemungkinan bagi upaya penyelesaian kontroversi. *Inaction* dapat pula merupakan implikasi dari sikap keras kepala kedua belah pihak yang tetap menginginkan adanya *status quo*.
5. *Withdrawing* (menarik diri); pihak yang memilih strategi ini memilih untuk meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun psikologis secara permanen. *Withdrawing* melibatkan pengabaian terhadap kontroversi. *Withdrawing* dapat pula mempunyai konotasi pemaksaan yang jauh lebih dalam, dimana situasi ketidakpastian sengaja diciptakan sehingga pihak lain tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan dan diharapkan akan mengalah.

Walaupun terdapat lima strategi yang berbeda dalam penyelesaian konflik sebagaimana disebutkan di atas, akan tetapi pada kebanyakan situasi konflik yang terjadi menuntut diterapkannya kombinasi dari beberapa strategi di atas. Sangat jarang hanya digunakan satu macam strategi secara eksklusif.

Konflik antara masyarakat dengan TN Babul dalam pemanfaatan SDAH memungkinkan untuk diselesaikan melalui pengaturan zonasi meskipun masih terdapat perbedaan dalam menafsirkan peraturan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi (UU No. 5/1990 dan PP. No. 28/2011) serta Permenhut No. P.56/2006 tentang pengaturan zonasi dalam Taman Nasional (Kadir W. *et al.*, 2012b). Zona tradisional dan zona khusus merupakan zona yang diharapkan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat sekitar TN Babul.

Aspirasi masyarakat sekitar kawasan TN Babul telah diupayakan untuk diakomodir oleh Balai TN Babul selaku pengelola kawasan Taman Nasional. Upaya Balai TN Babul tersebut tertuang dalam laporan hasil konsultasi publik rancangan zonasi TN Babul tingkat kecamatan yang dilaksanakan pada Bulan November sampai dengan Desember Tahun 2010. Beberapa kesepakatan yang dicapai antara masyarakat dengan Balai TN Babul dari hasil kegiatan konsultasi publik rancangan zonasi TN Babul sesuai permasalahan yang berkembang di masyarakat, diantaranya (Balai TN Babul, 2010):

1. Tata Batas Kawasan TN Babul

- a. Pergeseran-pergeseran pal batas di lapangan (revisi dan review) akan diupayakan untuk dikoordinasikan oleh Balai TN Babul dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Makassar.
- b. Penataan batas zonasi perlu dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan pihak pemerintah setempat;
- c. Batas antar zona perlu dibangun dengan jelas, dapat berupa pagar tanaman yang berbeda-beda antara zona yang satu dengan yang lainnya.
- d. Peta kawasan TN Babul, baik peta detail hasil penafsiran citra satelit atau peta kawasan lainnya agar dapat disosialisasikan kepada pemerintah kecamatan dan desa-desa yang berbatasan langsung dengan kawasan. Pemerintah desa dan kecamatan yang berbatasan dengan TN Babul diharapkan juga memiliki peta-peta yang berkaitan dengan keberadaan Taman Nasional.

2. Pemanfaatan SDAH dalam Kawasan TN Babul

- a. Peremajaan kemiri dapat diijinkan oleh pihak Balai TN Babul di dalam zona tradisional dengan mempertimbangkan sistem yang sudah dipraktekkan oleh masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan Taman Nasional. Peremajaan kemiri dilaksanakan atas persetujuan dan pengawasan pihak Balai TN Babul berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa/kelurahan.
- b. Permintaan masyarakat agar dapat melakukan penebangan pohon yang telah dikembangkan sebelum adanya penunjukan TN Babul akan dikaji lebih lanjut pada zona khusus. Penebangan hanya dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat. Pelaksanaan

penebangan pohon lebih lanjut diatur melalui peraturan desa dengan mempertimbangkan karakteristik biofisik setempat.

- c. Pada zona khusus dimungkinkan untuk mengelola areal persawahan yang telah ada sebelum penunjukkan TN Babul.

Meskipun dalam kegiatan konsultasi publik telah dicapai beberapa kesepakatan antara masyarakat dengan pengelola kawasan TN Babul sebagaimana disebutkan di atas, akan tetapi implementasinya baru akan dilaksanakan setelah rancangan tersebut mendapatkan persetujuan Menteri Kehutanan. Hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah bagaimana mendetailkan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam zona-zona tersebut. Selain itu, perlu pula disusun bagaimana mekanisme pelaksanaannya yang mencakup bagaimana proses perencanaannya, bagaimana proses pelaksanaannya, dan bagaimana mengontrol dan mengevaluasinya serta pihak mana saja yang dapat terlibat sehingga tidak menimbulkan kerusakan kawasan dan konflik baru dikemudian hari.

Balai TN Babul juga telah melakukan upaya untuk penyelesaian konflik dalam pemanfaatan SDAH seperti yang terjadi di Desa Labuaja, Kecamatan Cenrana dalam hal pemanfaatan lahan eks/bekas areal Hutan Kemasyarakatan (HKM) di daerah tersebut. Melalui serangkaian pertemuan yang difasilitasi oleh Forum Komunikasi Masyarakat TN Babul dan Universitas Hasanudin (UNHAS) akhirnya diperoleh kesepakatan terkait areal eks/bekas HKM yang selama ini dikelola masyarakat yang dikemas dalam bentuk kegiatan reboisasi pengayaan pada zona tradisional. Adapun kesepakatan yang dihasilkan diantaranya bahwa komposisi jenis tanaman yang akan dikembangkan terdiri dari:

- a. Jenis rimba sebanyak 280 batang/ha (70%), jenis kayu pertukangan sebanyak 40 batang/ha (10%), dan jenis penghasil buah-buahan/MPTS sebanyak 80 batang/ha (20%).
- b. Masyarakat diberikan hak untuk memanfaatkan hasil dari kegiatan tersebut berupa jenis kayu pertukangan dan jenis MPTS, dengan syarat bahwa jenis-jenis rimba berhasil tumbuh dengan baik di masing-masing lokasi.
- c. Pengaturan tentang teknis pemanfaatan tersebut selanjutnya akan disusun lebih detail sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kesepakatan tersebut telah diupayakan untuk mengakomodir kepentingan masyarakat sekitar TN Babul dalam hal pemenuhan kebutuhan kayu masyarakat di masa datang, serta adanya peluang untuk melakukan praktik perladangan selama 1-2 tahun di sela-sela tanaman rimba dan tanaman penghasil kayu tersebut. Pihak TN Babul tentunya mendapatkan manfaat dari kegiatan reboisasi ini karena areal eks/bekas HKM dapat dihijaukan kembali. Namun demikian, kesepakatan tersebut berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari karena tidak dijelaskan bagaimana mekanisme pelaksanaannya serta seberapa besar persentasi tumbuh dari tanaman jenis rimba yang menjadi persyaratan untuk dapat menikmati hasil dari jenis kayu pertukangan. Untuk itu dialog lanjutan terkait pemanfaatan areal eks/bekas HKM harus terus dilakukan sehingga diperoleh kesepakatan-kesepakatan yang saling menguntungkan dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Apabila memperhatikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai TN Babul dalam menyelesaikan konflik pengelolaan kawasan TN Babul, dapat diketahui bahwa strategi yang ditempuh oleh Balai TN Babul dalam menyelesaikan konflik tersebut diantaranya adalah *problem solving* (pemecahan masalah), *yielding* (mengalah), dan *inaction* ("diam"). Strategi *problem solving* yang ditempuh oleh Balai TN Babul antara lain tercermin dari sikap akomodatif terhadap peluang dilakukannya peremajaan kemiri dalam kawasan TN Babul, peluang untuk tetap melakukan aktivitas ekonomi berupa pengelolaan areal persawahan dalam kawasan zona khusus, dan kolaborasi dengan masyarakat dalam kegiatan reboisasi pengayaan lahan eks/bekas HKM yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman. Strategi *yielding* Balai TN Babul tercermin dari upaya untuk meninjau ulang batas-batas kawasan TN Babul yang dipermasalahkan oleh masyarakat, peluang perubahan beberapa zona yang diusulkan oleh Balai TN Babul pada beberapa lokasi sesuai usulan masyarakat, dan pengakuan secara *de facto* hak kepemilikan lahan masyarakat di Kampung Pangia (Dusun Pattunuang) dan Dusun Tallasa serta keterlibatan dalam mempercepat proses *enclave* pada daerah tersebut. Strategi *inaction* ditempuh oleh Balai TN Babul dalam menyikapi permasalahan peluang pemanfaatan hasil hutan berupa kayu yang telah dikembangkan masyarakat

sebelum adanya penunjukan kawasan TN Babul karena akan dilakukan pengkajian lebih lanjut.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan terkait konflik yang terjadi dalam pengelolaan TN Babul dan upaya yang ditempuh Balai TN Babul dalam mengatasi konflik tersebut, maka beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan mencegah terjadinya konflik yang lebih luas diantaranya adalah:

1. Melakukan komunikasi dan duduk bersama (berdialog)

Kegiatan ini dilakukan untuk meminimalkan perbedaan antara masyarakat dan pengelola TN Babul serta untuk menjalin suasana keakraban dan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Komunikasi dan dialog yang dilakukan dengan benar akan membuka jalan pada terwujudnya kolaborasi dalam pengelolaan TN Babul. Dialog dapat berjalan dengan baik, apabila didasarkan pada kesadaran terhadap karakteristik peserta yang memiliki kepentingan yang beragam dan terdapat saling ketergantungan di antara kepentingan yang beragam tersebut, keterwakilan peserta dialog di mana peserta dialog mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang diwakilinya (Innes dan Booher, 2003). Apabila proses komunikasi dan dialog yang dilakukan berjalan dengan baik, maka kebijakan yang ditempuh oleh Balai TN Babul dalam pengelolaan kawasan TN Babul akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan memudahkan dalam proses implementasinya.

Beberapa *stakeholder* yang dapat terlibat dalam proses dialog diantaranya Balai TN Babul, masyarakat sekitar TN Babul, pemerintah desa dan kecamatan, Pemda Maros (instansi teknis terkait seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan), LSM dan Forum Masyarakat TN Babul, serta perguruan tinggi/lembaga penelitian. Beberapa *stakeholder* tersebut di atas merupakan *stakeholder* primer dan juga merupakan *key players* (pemain kunci) dalam pengelolaan TN Babul (Kadir W. *et al.*, 2013).

2. Mengintensifkan kegiatan sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kebijakan pengelolaan TN Babul. Dengan adanya kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat mengetahui posisi mereka dalam pengelolaan TN Babul dan dapat melakukan

penyesuaian-penyesuaian dengan dukungan berbagai pihak yang dilandasi semangat kebersamaan. Kegiatan sosialisasi kebijakan pengelolaan TN Babul harus dapat menyentuh masyarakat pada level yang paling bawah dan diharapkan tersebar secara merata. Untuk itu kegiatan sosialisasi tersebut harus dilakukan oleh aparat TN Babul yang mempunyai kompetensi dan pemahaman yang baik mengenai kebijakan pengelolaan TN Babul, sehingga mampu menjawab permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat terkait pengelolaan TN Babul. Kegiatan ini tentunya memerlukan waktu yang cukup lama, akan tetapi dampaknya terhadap keberhasilan pengelolaan TN Babul sangat besar.

3. Mendetailkan kegiatan-kegiatan pada setiap zona TN Babul

Rancangan zonasi TN Babul yang ditawarkan kepada masyarakat tidak hanya terhenti pada batas-batas antar zona. Rancangan zonasi yang ditawarkan harus segera ditindak lanjuti dengan mendetailkan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat pada setiap zona khususnya zona tradisional dan zona khusus dengan memperhatikan kondisi dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Selain mendetailkan kegiatan pada setiap zona Taman Nasional, perlu pula disusun mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut termasuk mekanisme pemanfaatan hasil dari kegiatan yang dilakukan. Penyusunan mekanisme pelaksanaan kegiatan dan mekanisme pemanfaatan hasil kegiatan sedapat mungkin melibatkan masyarakat sekitar yang bersentuhan langsung dengan kegiatan tersebut serta pihak-pihak lain yang dapat memberikan masukan dalam penyusunan mekanisme tersebut.

4. Mengembangkan sumber-sumber penghasilan bagi masyarakat

Penghasilan masyarakat dalam kawasan TN Babul bersumber dari kegiatan pemanfaatan lahan untuk kegiatan usahatani seperti bersawah (padi), berladang (jagung, kacang-kacangan, dan hortikultura) dan berkebun (kakao dan kopi) serta pemanfaatan hasil tanaman (kemiri, dan nira aren) (Kadir W. *et al.* 2012a). Kegiatan-kegiatan tersebut sedikit banyak berkontribusi terhadap total pendapatan masyarakat akan tetapi dapat menyebabkan kerusakan kawasan jika tidak dilakukan dengan benar. Untuk itu perlu diupayakan pengembangan sumber-sumber

pendapatan baru yang lebih ramah lingkungan. Salah satu komoditas yang dapat dikembangkan dalam kawasan TN Babul adalah iles-iles (*Amorphopallus oncophyllus*) atau masyarakat sekitar menyebutnya dengan tanaman tirai yang termasuk salah satu jenis tanaman umbi-umbian. Tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena memiliki banyak kegunaan dan permintaan iles-iles (*Amorphopallus oncophyllus*) baik dalam negeri maupun luar negeri terus meningkat. Tanaman ini banyak tumbuh liar di dalam dan di sekitar kawasan TN Babul dan telah dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat di Dusun Pattiro, Desa Labuaja, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. Tanaman ini sangat potensial dikembangkan dalam kawasan TN Babul sebagai salah satu sumber penghasilan masyarakat karena disamping memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi (Rp. 10.000,-/kg kering), tanaman ini pada umumnya tumbuh di bawah tegakan pada awal musim penghujan dan tidak memerlukan pengolahan tanah yang intensif. Permasalahannya adalah masyarakat belum memahami dengan baik teknik budidaya. Masyarakat hanya memanfaatkan tanaman yang tumbuh liar pada lahan garapannya. Hal yang perlu dilakukan oleh Balai TN Babul adalah melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Maros dan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur untuk membantu masyarakat dalam hal budidaya dan pengolahan pasca panennya.

5. Mengembangkan zona pemanfaatan TN Babul

Kawasan TN Babul memiliki potensi yang cukup baik untuk pengembangan wisata, baik wisata alam karena memiliki panorama alam yang indah, maupun wisata sejarah karena banyaknya situs-situs peninggalan bersejarah. Objek-objek wisata tersebut pada umumnya terdapat pada zona pemanfaatan TN Babul. Zona pemanfaatan untuk tujuan wisata harus dapat dikelola dengan baik oleh Balai TN Babul, karena di samping dapat mendatangkan pendapatan bagi pengelola TN Babul, juga dapat mendorong perkembangan perekonomian daerah khususnya desa-desa yang berbatasan langsung dengan objek wisata tersebut. Penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung kenyamanan wisatawan perlu dikembangkan dengan baik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hayati *et al.*, (2011) menunjukkan

bahwa terdapat kecenderungan penurunan keinginan masyarakat untuk membayar lebih tinggi dari nilai yang telah ditetapkan oleh pengelola objek wisata yang terdapat dalam kawasan TN Babul. Hal ini disebabkan kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia serta terbatasnya variasi objek wisata yang dapat dinikmati oleh pengunjung dalam suatu kawasan wisata.

6. Mengembangkan zona penyangga kawasan TN Babul

Salah satu penyebab konflik dalam pengelolaan TN Babul adalah rendahnya tingkat pendapatan masyarakat serta tingginya tingkat ketergantungan masyarakat secara ekonomi terhadap kawasan TN Babul. Salah satu penyebab rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dan tingginya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan TN Babul adalah belum optimalnya pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh masyarakat sehingga produktivitasnya rendah. Sebagian masyarakat sekitar kawasan TN Babul selain memiliki lahan dalam kawasan TN Babul juga memiliki lahan di luar kawasan tersebut. Lahan-lahan yang terdapat di luar kawasan TN Babul oleh sebagian masyarakat belum dimaksimalkan. Belum maksimalnya pemanfaatan lahan masyarakat di luar kawasan TN Babul tercermin dari masih terdapatnya lahan-lahan yang dibiarkan terlantar, masih terdapatnya lahan-lahan di bawah tegakan yang tidak dimanfaatkan. Meskipun lahan tersebut digarap akan tetapi tanaman yang ada di dalamnya tidak dipelihara dengan baik. Apabila lahan-lahan masyarakat yang terdapat di luar kawasan TN Babul dapat dimaksimalkan maka tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan TN Babul dapat dikurangi, sehingga tekanan terhadap kawasan TN Babul pada akhirnya menjadi berkurang. Selain itu, dapat dikembangkan unit-unit usaha produktif di luar kawasan yang berbasis pada potensi sumberdaya di desa serta tidak berbasis lahan agar secara berangsur-angsur mengurangi ketergantungan mereka terhadap kawasan Taman Nasional. Meskipun pengembangan kawasan penyangga (Kawasan di luar TN Babul) bukan merupakan tupoksi Balai TN Babul, akan tetapi pihak TN Babul dapat memfasilitasi terciptanya kolaborasi dalam upaya pengembangan kawasan penyangga dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat melalui instansi-

instansi teknis terkait serta pihak-pihak lainnya (LSM, Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Konflik yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan TN Babul terkait dengan konflik tata batas kawasan Taman Nasional dan konflik dalam pemanfaatan sumberdaya hutan yaitu pemanfaatan lahan dan pemanfaatan tumbuhan.
2. Konflik yang terjadi disebabkan oleh pemberian informasi yang kurang tepat pada saat kegiatan penataan batas kawasan hutan yang pada akhirnya melahirkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat kehutanan, adanya posisi yang tidak selaras serta perbedaan pandangan antara masyarakat dan pemerintah khususnya dalam pemanfaatan SDAH yang terdapat dalam kawasan TN Babul, terhalangnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat khususnya kebutuhan untuk mendapatkan penghidupan yang layak yang bersumber dari pemanfaatan SDAH dalam kawasan TN Babul, serta belum adanya penghargaan terhadap kearifan lokal masyarakat khususnya usaha-usaha masyarakat dalam membangun dan memelihara.
3. Upaya yang dilakukan oleh pihak TN Babul dalam mengatasi konflik adalah dengan menyusun rancangan zonasi untuk ditawarkan kepada masyarakat serta kolaborasi dalam kegiatan reboisasi pengayaan zona tradisional.
4. Strategi penyelesaian konflik yang ditempuh oleh Balai TN Babul dalam menyelesaikan konflik yang terjadi terdiri dari *problem solving* (pemecahan masalah), *yielding* (mengalah) dan *inaction* (“diam”).

B. Saran

1. Untuk mengatasi dan mencegah terjadinya konflik yang lebih luas, maka komunikasi dan dialog dengan masyarakat sekitar perlu diintensifkan, melakukan sosialisasi kebijakan Taman Nasional dan mendetailkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada setiap zona TN Babul dengan tetap memperhatikan kondisi

dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

2. Balai TN Babul perlu melibatkan *stakeholder* lainnya selain masyarakat sekitar dalam proses dialog dalam membantu menyelesaikan konflik yang terjadi serta dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar TN Babul seperti pemerintah desa dan kecamatan, Pemda Maros (Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan), LSM setempat, Forum Masyarakat TN Babul, dan perguruan tinggi/lembaga penelitian.
3. Mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru bagi masyarakat sekitar, mengembangkan zona pemanfaatan TN Babul untuk tujuan wisata dan mengembangkan kawasan penyangga TN Babul untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan TN Babul.

DAFTAR PUSTAKA

- Balai TN Babul. 2008. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Periode 2008 - 2027 Kabupaten Maros dan Pangkep. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros.
- Balai TN Babul. 2010. Laporan Konsultasi Publik Rancangan Zonasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Tingkat Desa dan Kecamatan. Kementerian Kehutanan. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam. Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros.
- Fisher, S., Ludin, J., William, S., Abdi, D.I., Smith, R., dan William S. 2001. Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak. The British Council. Jakarta.
- Hayati N, A. Kadir W, E.Hapsari, Zainuddin, dan Supardi. 2011. Valuasi ekonomi jasa lingkungan di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Laporan Hasil Penelitian. Balai Penelitian Kehutanan Makassar. Tidak dipublikasikan.

- Innes, J.E. and Booher, D.E. 2003. Collaborative Policymaking: Governance Through Dialogue. in *Deliberative Policy Analysis. Understanding Governance in the Network Society*. Edited by Hajer, M.A. dan Wagenaar, H. Cambridge Univer.
- Jusuf, Y., Supratman dan Alif KS, M. 2010. Pendekatan Kolaborasi dalam Pengelolaan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung : Strategi Menyatukan Kepentingan Ekologi dan Sosial Ekonomi Masyarakat. Opinion Brief No. ECICBFM II-2010.02. The Center for People and Forest. RECOFTC. Makassar.
- Kadir W., Abd., Awang, S.A., Purwanto, R.H. dan Poedjirahajoe, E. 2012a. Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*. Vol. 19 No. 1. Maret 2012. Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada (PSLH UGM). Yogyakarta.
- Kadir W., Abd., Awang, S.A., Purwanto, R.H. dan Poedjirahajoe, E. 2012b. Peremajaan Kemiri (*Aleurites moluccana* Wild.) pada Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (Sebuah Tinjauan Kebijakan Pemerintah). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. Vol. 9 No. 3. Desember 2012. Kementerian Kehutanan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan. Bogor.
- Kadir W., Abd., Awang, S.A., Purwanto, R.H. dan Poedjirahajoe, E. 2013. Analisis *Stakeholder* Pengelolaan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*. Vol. 20 No. 1. Maret 2013. Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada (PSLH UGM). Yogyakarta.
- Mangindaan, E.E. 1999. Sambutan Gubernur Sulawesi Utara, pada Pertemuan Regional Pengelolaan Taman Nasional Kawasan Timur Indonesia, Tanggal 23 Agustus 1999 di Manado.
- Munggoro, D.W. 1999. Manajemen Kemitraan: Meretas Kemelut Pengelolaan Kawasan Konservasi. Makalah Prosiding. Seminar Pemberdayaan Aser Perekonomian Rakyat Melalui Strategi Kemitraan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Di Kabupaten Jember. Pustaka latin. Bogor.
- Pruitt, D.G. dan Rubin, J.Z. 2009. Teori Konflik Sosial. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Siregar, A.M. 1999. Kebijakan Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia. Makalah disampaikan pada Pertemuan Regional Pengelolaan Taman Nasional Kawasan Timur Indonesia, Tanggal 23 Agustus 1999 di Manado.
- Tadjudin, D. 2000. Manajemen Kolaborasi. Pustaka Latin. Bogor.
- Yusran, 2005. Mengembalikan Kejayaan Hutan Kemiri Rakyat. Governance Brief. Nomor 10. Juni 2005. Center for International Forestry Research, CIFOR. Bogor.